



ISU STRATEGIS DARI MASA KE MASA SEPUTAR PROSES BISNIS - ORGANISASI - HUBIN PERTAMINA (Reorientasi Gerakan Serikat Pekerja Dalam Menghadapi Konstelasi Sektor Energi Indonesia)

Faisal Yusra
www.faisalyusra.com
17 Januari 2024

Scan me!





Ir. Faisal Yusra SH., MM., QIA., CFrA., CEA

Profesi :

- Team Leader, PMO Tim Kostra PSN BAPPENAS
- Chairman Forum Ekselen Bisnis Indonesia
- Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia
- SVP Supply Dist. & Infrast. Pertamina (2019 – 2020)
- Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2019 – 2020)
- Ketua Komite MR & SDM PT PHE (2019 – 2020)
- Project Leader PTKAM Pertamina (2015 – 2019)
- Chief Audit Executive Pertamina (2017 – 2019)
- VP Quality, System & KM Pertamina (2014 – 2017)
- Manager Quality Management (2009 – 2014)

Penghargaan :

- The Global Emerging Leader Award in Community Development Category, Bangkok, 2022
- Satyalancana Kehormatan Wirakarya Presiden RI, 2015
- Penghargaan Direktur Utama, 2011 (HUT Pertamina)
- Penghargaan Direktur Utama, 2012 (HUT Pertamina)
- Penghargaan Direktur Utama, 2015 (HUT Pertamina)
- Penghargaan Direktur Utama, 2017 (HUT Pertamina)
- Penghargaan Direktur Utama, 2019 (HUT Pertamina)

Surat Terbuka ke Rini Soemarno Pasca Rombak Direksi Pertamina

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance

Selain itu, menambah dua posisi baru, yaitu Direktur Pemasaran Korporat dan

TAMBANG

 co.id

Premium RON 88 Dihapus, Bisnis Pertamina Terancam Hancur

2 Desember 2014 | 18:01

Salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak yang dipimpin ekonom Faisal Basri adalah penghapusan premium RON 88. Terkait rencana ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra

Pertamina klaim mampu hemat produksi BBM tahun ini Rp 3 T

Senin, 7 Desember 2015 16:24

Reporter : Pramirvan Datu Aprillatu

"Kita berbangga hati khususnya seluruh pekerja I...
uta atau sekitar Rp 3 triliun," ujar Project Coordin...
Arus Minyak, Faisal Yusra, di Kantornya, Jakarta, S

BERITA ANALISIS, TERPERCAYA
ObsessionNews

Pertamina Sulit Bersaing Kedepannya



Jakarta – Pertamina salah satu BUMN non perba...
Indonesia. Tapi sekarang ini, Pertamina mengala...
tiga kelompok pembagian dalam tubuh Pertamina:

KSPMI Desak Pemerintah Tetapkan 8 Blok Migas Kepada Pertamina, Ini Alasannya

Oleh M Anwar pada hari Senin, 27 Nov 2017 - 00:05:38 WIB | 0 Komentar



Inovasi Kunci Kesuksesan Perusahaan

JAKARTA - Tak ada perusahaan yang maju tanpa melakukan inovasi. Hal tersebut diungkap...
President Supply, Distribution, & Infrastructure Pertamina dalam talkshow yang diadakan

Kontan.co.id
NEWS.DATA.FINANCIAL TOOLS

KSPMI: Pertamina bisa kelola Mahakam 100%

JAKARTA. PT Pertamina (Persero) dinilai mampu untuk mengelola blok M...
secara mandiri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KS...
Faisal Yusra bilang dari segi teknomik, Pertamina memang sangat sanggup

Scan me!



Senio...
intor...
"La...
ngkul...

PEMERINTAH DIMINTA CABUT PERATURAN DIVIDEN BUMN

User Rating: 0000 / 0
Poor Best

Written by Suara Karya
Selasa, 17 Maret 2009



JAKARTA (Suara Karya). Pemerintah didesak untuk segera mencabut PP No 73/2001 tentang pembagian dividen BUMN. Pasalnya, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia (KSP Migas Indonesia) **Faisal Yusra**, peraturan itu tak kondusif bagi operasional BUMN.

"Dalam PP Nomor 73/2001 diatur sedemikian rupa soal pembagian laba BUMN. Misalnya untuk Pertamina pembagiannya 60 persen pemerintah dan 40 persen porsi Pertamina. Masing-masing 20 persennya untuk dana cadangan dan 20 persennya untuk dana operasional Pertamina. KSP Migas Indonesia, di Jakarta, kema

PERAN PERTAMINA HENDAK DIREDUKSI

User Rating: 0000 / 1
Poor Best

Written by Suara Karya
Selasa, 26 April 2011



Pengalihan saham Kodeco Energy Co Ltd dan CNOOC di Blok West Madura Offshore (WMO), masing-masing sebesar 12,5 persen kepada FT Sinergindo Citra Harapan dan Pure Link Investment Ltd (PLI), diduga melanggar hukum. Bahkan, dengan potensi kerugian negara akibat kebijakan pemerintah dalam kasus WMO ini, perpejalan kontrak kepada CNOOC dan Kodeco serta pengalihan saham kepada SCH dan PLI harus dibarengi dengan pembatasan hak-hak mereka.

Namun, lanjut dia, usulan itu belum akan disampaikan kepada pemerintah. "Kita tahu pemerintah sudah tak fokus bekerja, tapi ini pemerintah baru nanti," kata Faisal.

la menambahkan, meski baru, organisasi yang dipimpinnya akan membangun sektor migas nasional. Menurut dia, sangat penting untuk

NASIONALISASI MIGAS UBAH DOMINASI ASING

User Rating: 0000 / 1
Poor Best

Written by Media Indonesia
Kamis, 05 Mei 2011



PEMERINTAH dituntut untuk menyingkirkan dominasi asing dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Selain itu, PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor tersebut perlu didukung untuk memperluas usaha migas di luar negeri.

Itu antara lain mengemuka dalam diskusi nasional Jakarta, kemarin.

Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia serta segera men

Menurut Presiden KSPMI Faisal Yusra, sa seharusnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah

"Bayangkan dari 900 ribu bph (barel per hari) yang dihasilkan Indonesia, 600 ribu bph (barel per hari) harus diimpor. Itu artinya kita masih bergantung pada asing yang beroperasi di Indonesia,"

Palembang, kemarin. Ia melanjutkan, saat ini berakhir masa kontrak eksploitasinya. Antara lain

Pemerintah diminta mengalihkan pengelola kompeten seperti Pertamina.

Di forum yang sama, pakar perbandingan IT manajemen pengelolaan migas.

Kebutuhan minyak di Tanah Air 1,4 juta bph tersisa dipenuhi melalui impor.

Di sisi lain, daya tahan stok minyak Indonesia akan kesulitan.

FSPPB GARDA TERDEPAN BISNIS PERTAMINA

User Rating: 0000 / 1
Poor Best

Written by Masalah Trust No. 12 Tahun 10
Kamis, 27 Januari 2011



Semua pihak, harus menyadari bahwa Pertamina adalah perusahaan yang sangat penting untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Karena itu semua pihak harusnya menjaga dan tidak mengganggu proses bisnis Pertamina untuk kepentingan dirinya, kelompoknya sehingga

Pertamina dapat tumbuh berkembang sesuai maksud dan tujuan pendiriannya untuk mendapatkan keuntungan bagi bangsa dan Negara.

FSPPB Garda Terdepan Bisnis Pertamina



Setiap gangguan dari pihak manapun dan menancam kelangsungan bisnis usaha Pertamina, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tidak akan diam. FSPPB akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi niat-niat jahat tersebut. Demikian Faisal Yusra, Ketua Tim Delapan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.

Nah, lebih jauh tentang FSPPB, Selasa (25/1) Faisal berkesempatan memberikan pandangannya kepada Usman dari Trust.

Berikut perkataannya:

Apa Visi Dan Misi FSPPB ?

Didalam anggaran Dasar organisasi diatur dengan jelas bahwa FSPPB sebagai wahana perjuangan kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota sekaligus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis usaha dan implementasi good corporate governance (GCG) di Pertamina.

Bagaimana Strategi Untuk Mencapai Tujuan Tersebut ?

Minyak dan Gas (BP Migas) yang menyakikan kontrak 2011 hanya akan berlaku hingga 7 Mei 2011 sanga rangkainya surat Nomor 0176/PO0000/2011/50 mina (50 persen), CNOOC (12,5 persen). Kodeco

ang selama 20 tahun. Hal ini jelas sangat menguntkan negara. Kebijakan ini dapat diduga sebagai ur Biskelutif Indonesian Resources Studies (IRESS) b

bertransaksi saham untuk kontrak yang k menjual sahamnya pengelolaan. "Denyran tidak pidana dan kejahatan kepada



SSTT... PERTAMINA BATAL JUAL PATRA JASA & AKUISI MEDCO?

User Rating: 0000 / 0
Poor Best

Written by Rakyat Merdeka
Selasa, 30 November 2012



Rencana PT Pertamina (Persero) menjual anak perusahaannya, PT Patra Jasa dan mengakuisisi saham korporat PT Medco Energi Internasional (MEI), diperkirakan batal. Pasalnya, Kementerian BUMN memberikan jaminan tidak akan melanjutkan penjualan Patra Jasa dan mengakuisisi saham Medco.

"Menteri BUMN Mustafa Abubakar melalui pembicaraan telepon kepada saya menegaskan telah menginstruksikan kepada Dewan Komisaris Pertamina tidak melanjutkan penjualan Patra Jasa dan mengakuisisi saham Medco," kata Koordinator Tim 8 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) **Faisal Yusra** kepada Rakyat Merdeka.

Menurut **Faisal**, Pemerintah selalu memperhatikan kepentingan Pertamina dan mengkomodir aspirasi para pekerja Pertamina. Menteri BUMN juga meminta kepadanya untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pekerja dan berharap para karyawan tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

Presiden FSPPB Ugan Gendar menyambut baik dan berterimakasih kalau memang Kementerian BUMN tidak melanjutkan penjualan Patra Jasa dan mengakuisisi saham Medco.

Menurutnya, keputusan Menteri BUMN tersebut menunjukkan Pemerintah telah menampung aspirasi dan keinginan dari para Pekerja di Pertamina.

PERTAMINA MINTA SERAHKAN BLOK MIGAS WEST MADURA OFFSHORE

User Rating: 0000 / 0
Poor Best

Written by Palembang Ekspres
Jumat, 06 Mei 2011



Palembang, PE- Sebagai badan usaha milik Negara (BUMN) yang memiliki prospek cerah dalam mengelola minyak, Pertamina tetap ektis berusaha mengelola minyak demi kesejahteraan rakyat.

Salah satunya dengan berusaha merebut blok migas West Madura Offshore (WMO) yang seharusnya dikelola oleh Pertamina, bahkan jika tidak dipertahankan ancaman federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dengan menggerakkan mogok kerja.



Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia (KSPMI) mengataka Pertamina Seluruh Indonesia (SP) yang memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia mengemukakan eksistensi meningkatnya minyak di Indonesia.

"Bahkan 30-40 persen perusahaannya," ujar **Faisal** Ekspres Kamis (5/5) usai seminar.

Seminar yang digelar tiga hari

menyebabkan pemikiran agar kedepan Pertamina lebih baik.

"Pertamina sudah hampir seengah abad berdiri untuk mempetujsangkan rakyat. Tetapi di s mlah tidak mendukung kerjasama kita selama ini," bebennya.

Faisal juga menyayangkan jika masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) terdapat disalahkan karena dianggap tidak mampu.

Belum lagi, terjadinya ledakan atau kebakaran akibat tabung Ekip yang nota bene disalahkan tetap Pertamina.

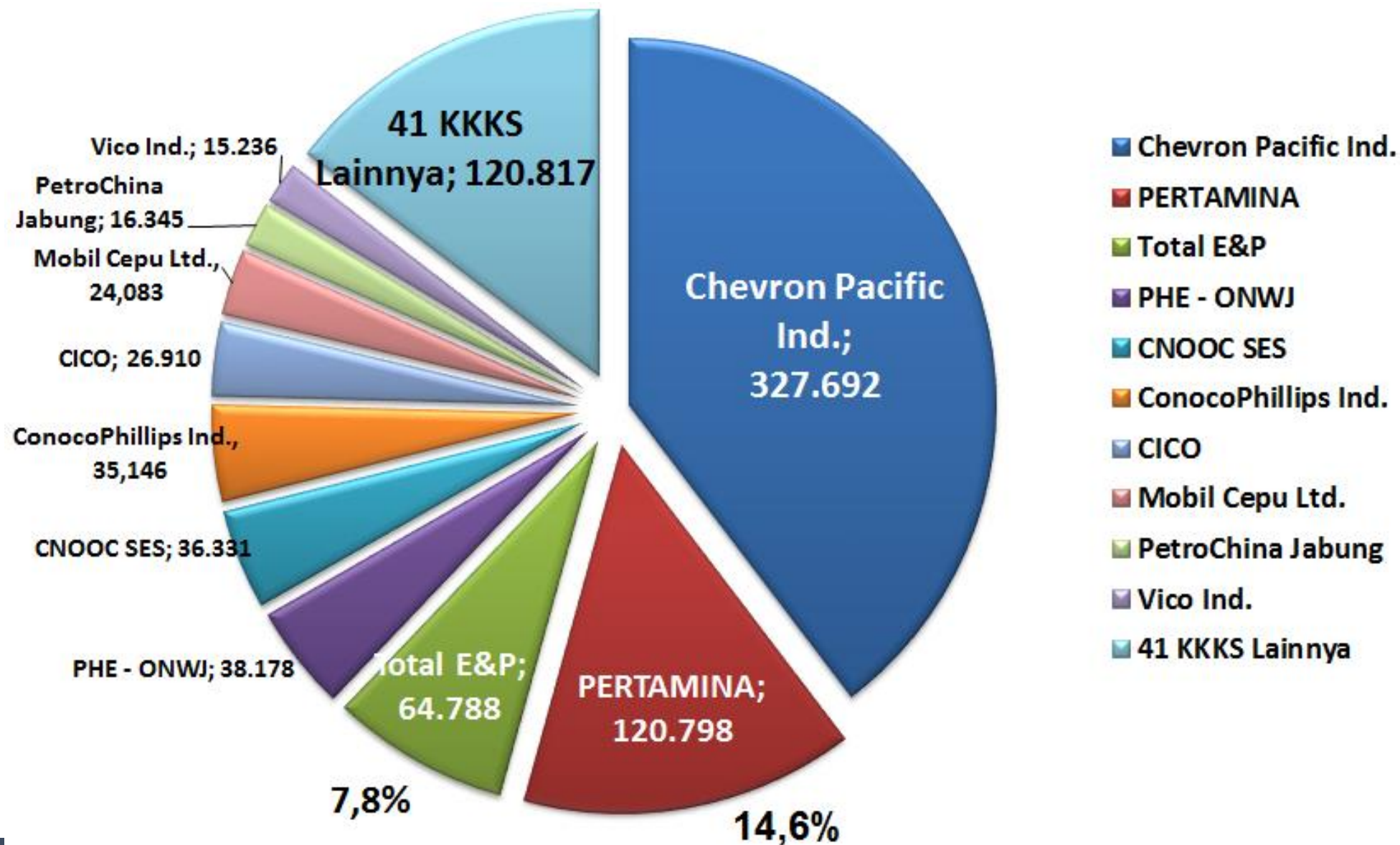


Isu Strategis (#1)

Neraca Migas Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Asas Big is Beautiful | Ketidakseimbangan Penguasaan Hulu – Hilir | Asing Mendominasi | Conoco–Philips; Exxon–Mobil; BP–Amoco & Total-Fina-Elf | Cadangan Terbatas

PRODUKSI MINYAK BUMI INDONESIA 2013



ENERGY RESERVES AND PRODUCTION

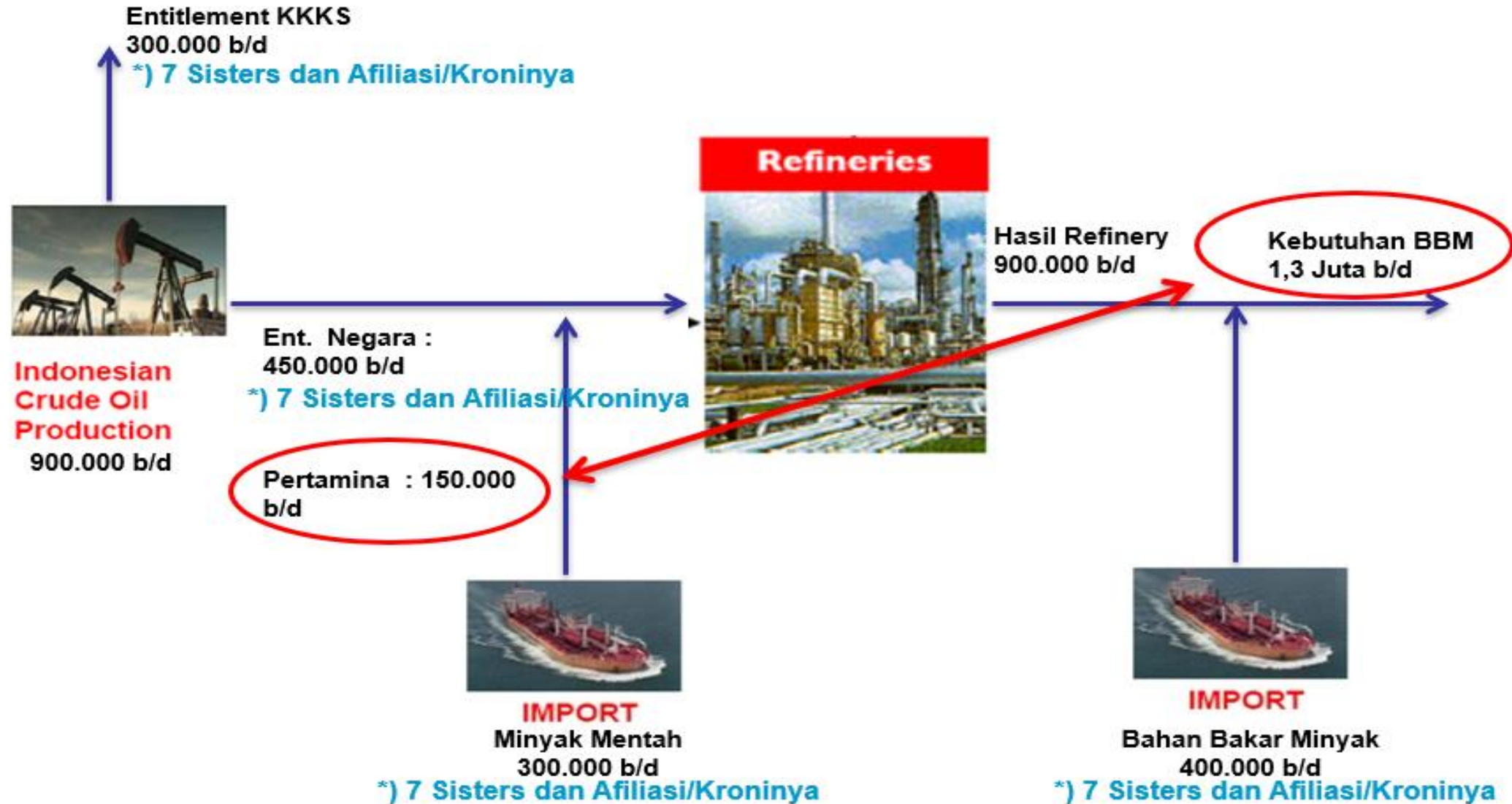
NO	NON FOSSIL ENERGY	RESOURCES (SD)	INSTALLED CAPACITY (KT)	RATIO KT/SD (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Hydro	75.670 MW	6.654,29 MW	8,8%
2	Geothermal	29.038 MW	1.226 MW	4,2%
3	Mini/Micro Hydro	769,69 MW	228,983 MW	29,75%
4	Biomass	49.810 MW	1.618,40 MW	3,25 %
5	Solar Energy	4,80 kWh/m ² /day	22,45 MW	-
6	Wind Energy	3 – 6 m/s	1,87 MW	-
7	Uranium	3.000 MW *)	30 MW **)	1.00

*) only in Kalan – West Kalimantan

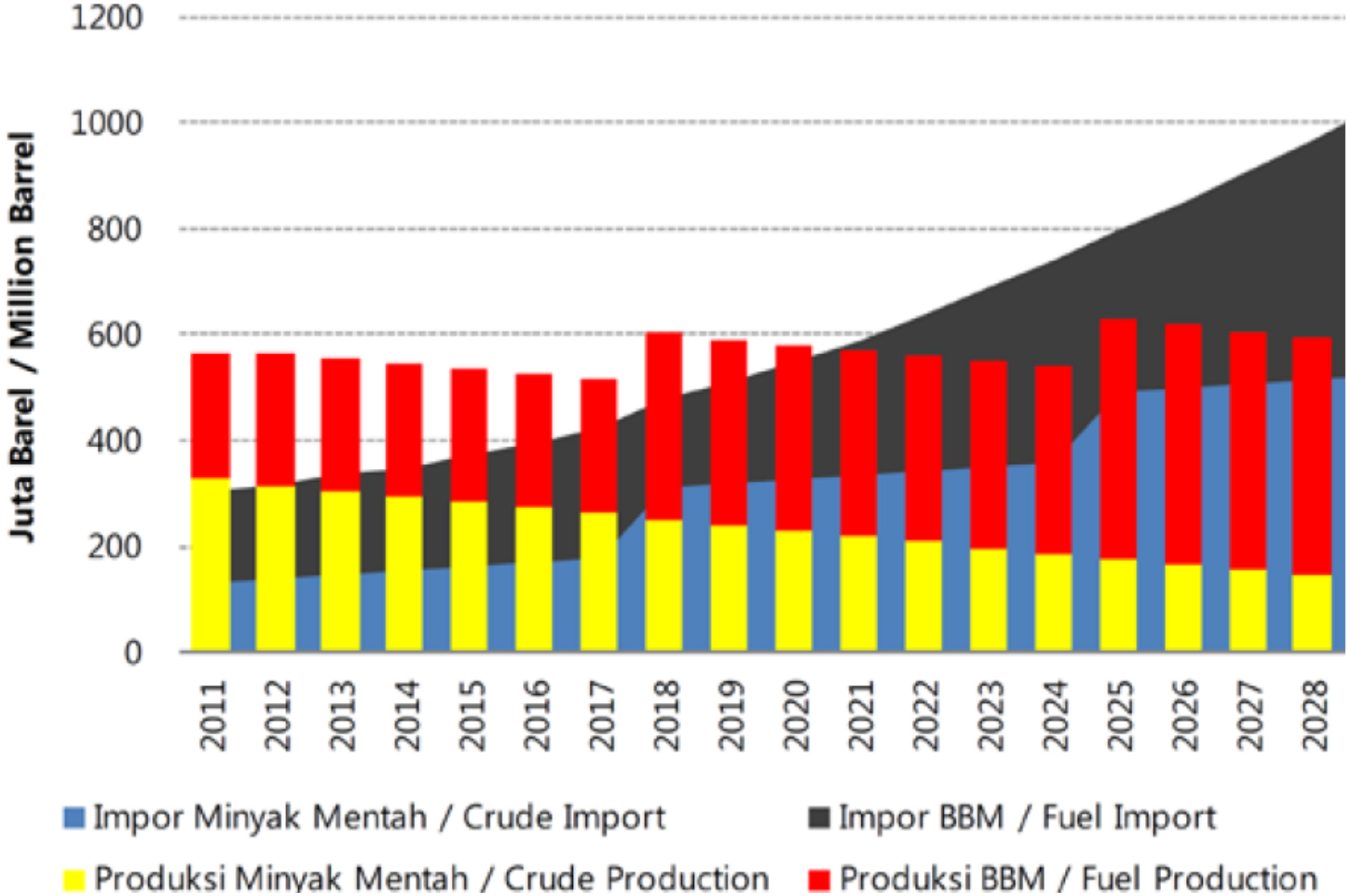
**) non energy. only for research

NO	FOSSIL ENERGY	RESERVES	PRODUCTION PER YEAR	RESERVE TO PRODUCTION RATIO
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Oil	4.0 billion barel	347 million barel	11 years
2	Gas	104.71 TSCF	3212 BSCF	32 years
3	Coal	28 billion ton	329 million ton	85 years

ARUS MINYAK INDONESIA



Produksi & Impor Minyak RI



Respon (#1)

Neraca Migas Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

**Rebut Blok Mahakam, Rokan & 8 Blok Migas Terminasi |
Diskusi WANTANAS | RDP DPR | Aksi Massa**

SALAH SATU REKOMENDASI SETJEN WANTANNAS TENTANG
“ANTISIPASI & SOLUSI JAMINAN PASOKAN ENERGI UNTUK
MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL”



Surat Sesjen Wantannas kepada Ketua Wantannas No. K-38/Sesjen/VI/2012 :
Pemerintah cq. Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemen ESDM,
Kemenkumham, Kemen BUMN, mendorong & menetapkan :

- Kebijakan serta peraturan guna meningkatkan temuan lapangan minyak baru dlm rangka mengamankan cadangan minyak nasional agar ketahanan nasional terjamin.
- Sinergi & implemementasi Inpres No.4 Thn 2012 tentang peningkatan produksi antar instansi negara yg terkait untuk menunjang kegiatan eksplorasi & produksi.
- Kebijakan *depletion premium* dlm rangka meningkatkan cadangan & produksi nasional secara konsisten.
- Perubahan untuk perbaikan regulasi dlm hal konsensi produksi minyak agar dikuasai BUMN/Pertamina.
- Blok-blok Migas yg telah habis masa kontrak agar tidak diperpanjang kpd kontraktor lama, namun diserahkan kpd Pertamina (misal blok Mahakam, blok Minas, dll).

NASIONALISASI MIGAS UBAH DOMINASI ASING

User Rating:  / 1

Poor      Best

Rate

Written by Media Indonesia
Kamis, 05 Mei 2011



PEMERINTAH dituntut untuk menyingkirkan dominasi asing dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Selain itu, PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor tersebut perlu didukung untuk memperluas usaha migas di luar negeri.

Itu antara lain mengemuka dalam diskusi nasionalisasi sektor migas yang digelar secara terpisah di Palembang dan Jakarta, kemarin.

Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Minyak Indonesia (KSPMI) menuntut agar pemerintah menasionalisasi pengelolaan migas di Indonesia serta segera merevisi Undang-undang (UU) No 22/2001 tentang Migas.

Menurut Presiden KSPMI Faisail Yusra, sampai saat ini pengelolaan migas masih dikuasai asing. Padahal seharusnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Bayangkan dari 900 ribu bph (barel per hari) produksi minyak nasional, separuh dari produksi itu dikelola perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia," ujar Faisail di sela kongres KSPMI yang diikuti 140 peserta, di Palembang, kemarin. Ia melanjutkan, saat ini ada sekitar enam wilayah pertambangan yang dikelola asing akan berakhir masa kontrak eksploitasinya. Antara lain, Blok A di Aceh, Blok Mahakam, dan Blok Madura.

Pemerintah diminta mengalihkan pengelolaan blok-blok tersebut kepada perusahaan nasional yang terbukti kompeten seperti Pertamina.

Di forum yang sama, pakar pertambangan ITB Bagus Ender Nurhandoko mengatakan, selama ini ada kesalahan manajemen pengelolaan migas.

Kebutuhan minyak di Tanah Air 1,4 juta bph sedangkan produksi hanya sekitar 900 ribu bph. Kebutuhan yang tersisa dipenuhi melalui impor.

Di sisi lain, daya tahan stok minyak Indonesia tergolong pendek, hanya 20 hari. Kalau itu tidak segera diantisipasi, Indonesia akan kesulitan.



PERTAMINA MINTA SERAHKAN BLOK MIGAS WEST MADURA OFFSHORE

Like Rating: 00000 / 0

Poor 0 0 0 0 0 Best **Kata**

Website: Palembang Ekspres

Jumat, 06 Mei 2012

**PALEMBANG
EKSPRES**

Palembang, PE- Sebagai badan usaha milik Negara (BUMN) yang memiliki prospek cerah dalam mengelola minyak, Pertamina tetap eksis berusaha mengelola minyak demi kesejahteraan rakyat.

Salah satunya dengan berusaha merebut blok migas West Madura Offshore (WMO) yang seharusnya dikelola oleh Pertamina, bahkan jika tidak dipenuhi ancaman federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPPB) akan dilakukan dengan menggelar aksi mogok kerja.



Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mengatakan bahwa Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) merupakan kelompok yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Selain memperjuangkan pekerja Migas, SPPSI juga dapat mengumpulkan kekuatan agar lebih meningkatkan minyak di Indonesia.

"Bahkan 30-40 persen perusahaan kita strategis dalam perkembangannya," ujar **Faisal Yusra** kepada Palembang Ekspres Kamis (5/5) saat seminar.

Seminar yang digelar tiga hari terakhir bertujuan berfokus untuk menyebarkan pemikiran agar kedepan Pertamina lebih baik.

"Pertamina sudah hampir setengah abad berdiri untuk memperjuangkan rakyat. Tetapi di sisi lain justru ada pihak yang malah tidak mendukung kerja keras kita selama ini," bebarnya.

Faisal juga menyayangkan jika masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) terdapat masalah. Pertamina yang disalahkan karena dianggap tidak mampu.

Belum lagi, terjadinya ledakan atau kebakaran akibat tabung Ekipa yang nota bene program pemerintah, yang disalahkan tetap Pertamina.

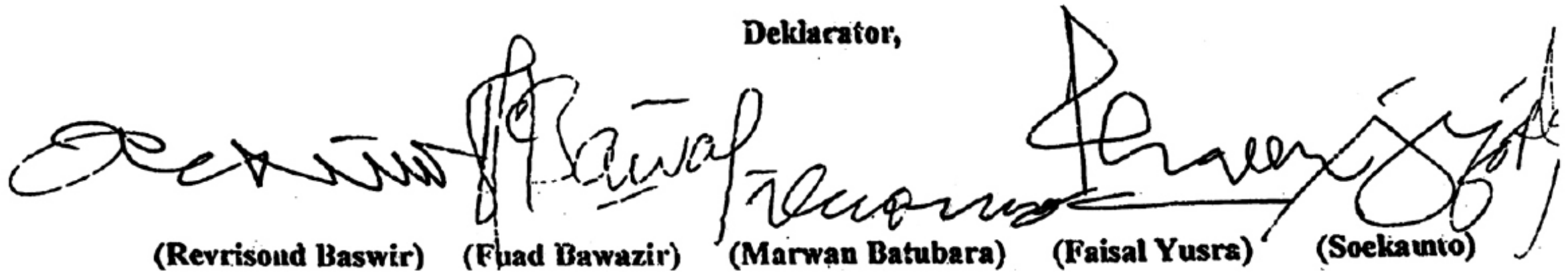


Berdasarkan hal diatas, maka kami rakyat Indonesia menyatakan :

1. Selamatkan aset dan sumber daya alam Indonesia
2. Menuntut pemerintah untuk mengakhiri dominasi dan intervensi asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia
3. Batalkan Joint Operation Agreement (JOA) Blok Cepu dan hentikan Renegosiasi Blok Natuna dengan ExxonMobil
4. Mendukung perusahaan nasional dalam negeri untuk mengelola kekayaan alam Indonesia
5. Mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap agenda ekonomi neoliberal dan dominasi asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Desember 2006

Deklarator,



(Revrisoud Baswir) (Fuad Bawazir) (Marwan Batubara) (Faisal Yusra) (Soekanto)

Isu Strategis (#2)

Eksistensi PERTAMINA Pasca UU Migas (Unbundling)

Skenario World Bank | **Dikotomi Bisnis Inti & Penunjang** |
Holding/Sub-holding

The World Bank

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

WORLD BANK OFFICE, JAKARTA
JSEB Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 57-53, Jakarta 12190
Telephone: (62-21) 52993000 • Facsimile: (62-21) 52993111

Mark Baird
Country Director, Indonesia

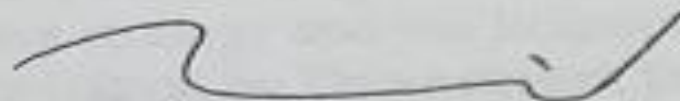
Letter No. M-598/MINING/V/2002

May 28, 2002

His Excellency
D. Poediono

To enable early competition on Java, the Cilacap refinery in Central Java—which is owned directly by the State rather than Pertamina—should desirably be vested in a new state-owned refiner-marketer (PT Java Petroleum). Consideration should also be given to establishing a third refiner-marketer SOE, perhaps centered on the Dumai and Sungai Pakning refineries in central Sumatera (PT Sumatera Petroleum). Under this scenario PT Pertamina would still be the largest refiner-marketer, owning among others the Balongan, Balikpapan and Musi refineries and having an exclusive off-take agreement with TPPI.

Yours faithfully,



Mark Baird

BAB III MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Pasal 3

(1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan, dan perusahaan patungan (*joint venture*), kecuali yang melakukan kegiatan usaha yang tidak terkait langsung atau tidak penunjang langsung dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Terhitung sejak tanggal berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO), seluruh kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan Pertamina yang kegiatannya tidak terkait langsung atau tidak penunjang langsung kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO), dikelola oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan statusnya lebih lanjut.



Respon (#2)

Eksistensi PERTAMINA Pasca UU Migas (Unbundling)

JR UU MIGAS | RDP DPR | DIM RPP PERTAMINA via Presiden
| Proses Litigasi Peradilan | Penyempunaan PKB



FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB)

SEKRETARIAT : JL. KRAMAT RAYA 59 JAKARTA TELP 021 - 31992339 FAX 021 - 39835801

3. Bahwa Pasal 4 dan 13 dalam RPP, yang harus dihapus sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, terasa kental nuansa ingin memecah-mecah Pertamina sebagai rencana awal upaya memprivatisasi Pertamina yang jelas-jelas akan membebani rakyat, menurunkan tingkat pelayanan dan tidak memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional sehingga berpotensi menimbulkan gejolak yang berdampak kepada ketahanan nasional.

Dengan disampaikannya masukan ini kepada Presiden RI, FSPPB berharap pertemuan dengan Tim Interdep nantinya dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi rakyat dan negara dan dapat dijadikan pertimbangan Presiden RI untuk menyetujui atau menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pertamina (Persero) tersebut.

Atas perkenan Presiden Republik Indonesia menerima masukan ini, diucapkan terima kasih.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Ketua Umum,

Wahjudi Suhartono

Sekretaris,

Faisal Yusra

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh:

- a. Nama : drg. Ugan Gandar
- Warga Negara : Indonesia;
- Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
- Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110
- b. Nama : Noviandri
- Warga Negara : Indonesia;
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
- Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : Faisal Yusra
- Warga Negara : Indonesia;
- Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)
- Alamat : Jl. Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**



Isu Strategis (#3)

Ketidakpastian Masa Depan Pekerja Pasca Perubahan PERTAMINA Menjadi Persero

Perikatan Pekerja | Ketidakpastian Pesangon



www.faisalyusra.com



[faisal.yusra](https://www.facebook.com/faisal.yusra)



[faisalyusra](https://twitter.com/faisalyusra)



[faisalyusra.id](https://www.instagram.com/faisalyusra.id)



taukabisa@gmail.com



[+62 8170140011](tel:+628170140011)

Respon (#3)

Ketidakpastian Masa Depan Pekerja Pasca Perubahan PERTAMINA Menjadi Persero

**DIM RPP PERTAMINA via Presiden | Pembentukan SP/FSPPB
| Perjanjian Kerja Bersama**

Isu Strategis (#4)

**PERTAMINA Menanggung Beban
Penyediaan Stok Operasional 30
Hari**

**Rp 30 Trilyun Menjadi Beban Perusahaan | Stok Operasional
Bukan Stok Nasional (SPR)**

Respon (#4)

PERTAMINA Menanggung Beban
Penyediaan Stok Operasional 30
Hari

**RDP DPR RI | Perpres Cadangan Penyangga Energi | Proyek
Strategis Nasional**

USULAN PENYEDIAAN CPE MEMPERTIMBANGKAN TRANSISI ENERGI

1. Ketentuan Jenis, Jumlah dan Waktu dalam R-Perpres CPE:

- a. Jenis CPE yaitu **Minyak Bumi, BBM jenis Bensin, dan LPG**.
- b. Jumlah dan Waktu CPE ditetapkan untuk **30 hari impor** yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan rata-rata impor harian nasional dan **disediakan secara bertahap** sesuai dengan **kemampuan keuangan negara** yang dipenuhi dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2035.

2. Sesuai *draft* Peta Jalan Transisi Energi dan GSEN, **diproyeksikan**:

- a. Impor minyak bumi akan meningkat
- b. Impor BBM (bensin) akan menurun dan akan dihentikan pada tahun 2028
- c. Impor LPG akan menurun dan dihentikan pada tahun 2026

Sehingga usulan tahapan penyediaan CPE:

1. Minyak Bumi disediakan secara **bertahap 30 hari impor s.d tahun 2035** (volume hari impor dihitung berdasarkan rata-rata impor harian **tahun 2035**).
2. BBM dan LPG disediakan secara **bertahap**, apabila terpenuhi **target 30 hari impor** maka penambahan volume **dihentikan** (volume hari impor berdasarkan rata-rata impor harian **tahun berjalan**).
3. Penyediaan volume BBM dan LPG dibatasi oleh ketersediaan kapasitas tangki eksisting dan tangki *idle*, dan jika perlu membangun tangki baru.

Isu Strategis (#5)

Pengenaan Porsi Keuntungan Yang “Diskriminatif” (Bagian Laba Pemerintah Di Pertamina)

PP 73 Tahun 2001 Tentang BLP | 60 % Diambil Pemerintah | 20% Sebagai Dana Cadangan | 20% Investasi dan lain-lain

Respon (#5)

Pengenaan Porsi Keuntungan Yang “Diskriminatif” (Bagian Laba Pemerintah Di Pertamina)

Rapat Dengan Pendapat DPR RI | Surat Terbuka Presiden RI



www.faisalyusra.com



[faisal.yusra](https://www.facebook.com/faisal.yusra)



[faisalyusra](https://twitter.com/faisalyusra)



[faisalyusra.id](https://www.instagram.com/faisalyusra.id)



taukabisa@gmail.com



+62 8170140011

PEMERINTAH DIMINTA CABUT PERATURAN DIVIDEN BUMN

User Rating:  / 0

Poor      Best 

Written by Suara Karya

Selasa, 17 Maret 2009

HARIAN UMUM
SUARA KARYA

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah didesak untuk segera mencabut PP No.73/2001 tentang pembagian dividen BUMN. Pasalnya, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia (KSP Migas Indonesia) Faisal Yusra, peraturan itu tak kondusif bagi operasional BUMN.

"Dalam PP Nomor 73/2001 diatur sedemikian rupa soal pembagian laba BUMN. Misalnya untuk Pertamina pembagiannya 60 persen pemerintah dan 40 persen porsi Pertamina. Namun, dari 40 persen itu, 20 persennya menjadi dividen Pertamina dan 20 persennya untuk dana cadangan, belanja, dan sebagainya. Itu tak cukup untuk operasional Pertamina. KSP Migas Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Namun, lanjut dia, usulan itu belum akan disampaikan kepada pemerintah mengingat pemerintahan SBY akan segera berakhir. "Kita tahu pemerintah sudah tak fokus bekerja, tapi ini tetap penting dan jadi agenda KSP untuk diperhatikan pemerintah baru nanti," kata Faisal.

Ia menambahkan, meski baru, organisasi yang dipimpinnya memiliki agenda krusial yang diharapkan bisa membangkitkan sektor migas nasional. Menurut dia, sangat tidak adil sektor yang memberikan kontribusi 40 persen dari total APBN itu di kendalikan oleh pihak-pihak yang tak memperjuangkan pertumbuhan perusahaan negara.

"Dengan profesionalisme dan kompetensi yang kita miliki, kita berharap sektor migas nasional ke depannya akan menjadi pilar strategis sebagai kerangka penguatan kedaulatan negara," tutur Faisal.



Isu Strategis (#6)

PERTAMINA Penyamun

Menjadi

Sarang

Korupsi Merajalela | Praktek GCG Memprihatikan

Respon (#6)

**PERTAMINA
Penyamun**

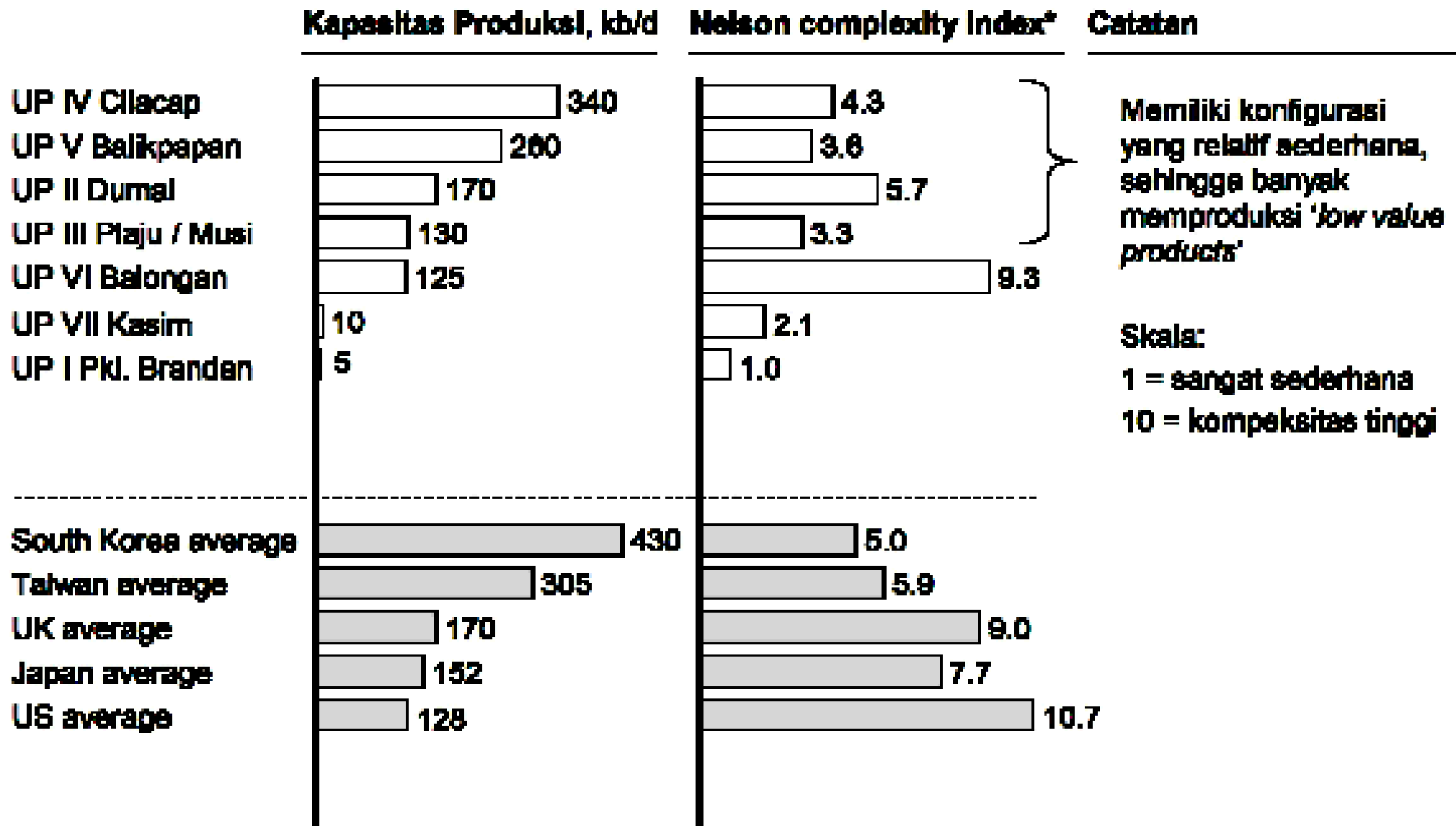
Menjadi Sarang

Lapor KPK | Aksi Massa | RDP DPR RI

Isu Strategis (#7)

Inefisiensi & Landed Least Cost Produk Yang Tidak Kompetitif

Harga Di Atas MOPS | Tidak Kompetitif



* Tidak merefleksikan margin / profitabilitas, hal-hal lain seperti tantangan logistik juga mempengaruhi profil ekonomi kilang dan tidak direfleksikan oleh Indeks Nelson

Kilang	Landed Least Cost (persen MOPS)	Landed Least Cost Kompetitor/Importir (persen MOPS)	Keterangan
UP. II	97 – 99	114 - 110	Kompetitif
UP. III	106 – 110	105 – 108	Kurang Kompetitif
UP. IV	106 – 109	105 – 106	Kurang Kompetitif
UP. V	103 – 105	106 – 109	Kompetitif
UP. VI	96 – 98	105	Kompetitif
UP. VII	112 – 113	105 - 109	Tidak Kompetitif



Respon (#7)

Inefisiensi & Landed Least Cost Produk Yang Tidak Kompetitif

**GRR Tuban | RDMP | CIP | PTKAM | POSE | Proposal
Kolaborasi Proyek Jaringan Pipa Di Proyek JTTS**

J. Sektor Energi		
187.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
188.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
189.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
190.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
191.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
192.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
193.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
194.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
195.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
196.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
197.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
198.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
199.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
200.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
201.	Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan <i>Compresion (UCC Project)</i> di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
202.	Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur



**Penugasan berdasarkan
Perpres No. 100 Tahun 2014 j.o
Perpres No. 131 Tahun 2022**



Keterangan:

—	Tahap I (Operasi)
—	Tahap I (Konstruksi)
—	Tahap II
—	Tahap III
—	Tahap IV

No	Ruas	Panjang (km)
I. A. Ruas Operasi		
1	Medan-Binjai	17
2	Bakauheni-Terbanggi Besar	141
3	Palembang-Indralaya	22
4	Tb Besar - Pematang Panggang	189
5	Pematang Panggang - Ky Agung	
6	Pekanbaru - Dumai	131
7a	Sigli - Banda Aceh (Seksi 2,3,4)	36
11b	Pekanbaru - Pangkalan (Seksi Pekanbaru-Bangkinang)	31
13a	Binjai - Pangkalan Brandan (Seksi 1)	12
Sub Total		579
Tahap I		
I. B. Ruas Konstruksi		
7b	Sigli - Banda Aceh	38
8	Kisaran - Indrapura	48
9a	Kuala Tanjung - Pematang Siantar	93
10a	Sp Indralaya - Prabumulih	65
11a	Sicincin - Padang	37
11b2	Pekanbaru - Pangkalan	34
12a	Taba Penanjung - Bengkulu	18
13b	Binjai - Pangkalan Brandan	46
Sub Total		378
Total Tahap I		957
Tahap II		
II. Ruas Rencana PPJT		
14	Betung - Tempino - Jambi	169
15	Jambi - Rengat	198
16	Rengat - Pekanbaru	207
17	Peabuhan Panjang - Lematang	8
Sub Total		582
Tahap III		
III. Ruas Backbone Lanjutan		
18	Dumai - Sp Sigambal - Rantau Prapat	181
19	Rantau Prapat - Kisaran	112
20	Langsa - Lhokseumawe	134
21	Lhokseumawe - Sigli	157
13c	Pangkalan Brandan - Langsa	74
Sub Total		657
Tahap IV		
IV. A. Ruas Feeder sudah PPJT		
22	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	112
9b	Pematang Siantar - Parapat	50
10b	Prabumulih - Muara Enim	56
11d	Payakumbuh - Sicincin	73
11e	Pangkalan - Payakumbuh	67
11f	Pangkalan - Bts Riau	14
12b	Lubuk Linggau - Taba Penanjung	80
Sub Total		452
IV. B. Ruas Feeder belum PPJT		
23	Prapat - Tanutung - Sibolga	102
24	Batu Ampar - M Kuning - Hang Nadim	20
Sub Total		122
Total		2.770

	Internal	DPR	Pemerintah	Peradilan	Aksi Massa	Status
Neraca Migas Indonesia Sangat Mengkhawatirkan		☆	☆		☆	Done
Eksistensi PERTAMINA Pasca UU Migas (Unbundling)	☆	☆	☆	☆		
Ketidakpastian Masa Depan Pekerja Pasca Perubahan PERTAMINA Menjadi Persero	☆		☆			Done
PERTAMINA Menanggung Beban Penyediaan Stok Operasional 30 Hari		☆	☆			Done
Pengenaan Porsi Keuntungan Yang “Diskriminatif” (Bagian Laba Pemerintah Di Pertamina)		☆	☆			Done
PERTAMINA Menjadi Sarang Penyamun		☆		☆	☆	Done
Inefisiensi & Landed Least Cost Produk Yang Tidak Kompetitif	☆		☆			



Reorientasi Pola Gerakan Untuk Fokus Pada Proses Konsolidasi Di Lingkungan Internal





FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

IKRAR PEKERJA

Kami, Pekerja dalam wadah **Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)** sebagai bagian terintegrasi di Perusahaan :

1. **Senantiasa** berupaya keras meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam rangka menjadikan **PT PERTAMINA (PERSERO)** sebagai Perusahaan yang unggul, maju dan terpandang, serta tetap mampu tumbuh dan berkembang sesuai maksud dan tujuan pendiriannya.
2. **Menentang** setiap rongrongan dari pihak manapun seperti upaya privatisasi secara **strategic sale (transfer ownership)** dan kebijakan yang mengarah kepada **unbundling PT PERTAMINA (PERSERO)**.
3. **Menjadi garda terdepan** yang mendorong setiap organ utama Perusahaan (**Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi**) untuk secara sadar menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (**good corporate governance**) demi kemajuan **PT PERTAMINA (PERSERO)**, termasuk menjalankan seluruh rekomendasi dari internal / eksternal auditor.
4. **Mengingatkan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO)** untuk memahami bahwa aspek hubungan industrial seperti **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** wajib dijalankan dengan rasa tanggung jawab, **non-diskriminatif**, dan tidak apriori terhadap masukan dari Pekerja dalam kerangka mempertahankan kelangsungan bisnis Perusahaan.

Yogyakarta, 27 Januari 2006

Ketua Umum,

drg. Ugan Gandar



Sekretaris Jenderal,

Ir. Faisal Yusra SH., MM.

	Internal	DPR	Pemerintah	Peradilan	Aksi Massa	Status
Neraca Migas Indonesia Sangat Mengkhawatirkan		☆	☆		☆	Done
Eksistensi PERTAMINA Pasca UU Migas (Unbundling)	☆	☆	☆	☆		
Ketidakpastian Masa Depan Pekerja Pasca Perubahan PERTAMINA Menjadi Persero	☆		☆			Done
PERTAMINA Menanggung Beban Penyediaan Stok Operasional 30 Hari		☆	☆			Done
Pengenaan Porsi Keuntungan Yang “Diskriminatif” (Bagian Laba Pemerintah Di Pertamina)		☆	☆			Done
PERTAMINA Menjadi Sarang Penyamun		☆		☆	☆	Done
Inefisiensi & Landed Least Cost Produk Yang Tidak Kompetitif	☆		☆			





Senang Meradang
 Abai Pusing Lupa
 Galau Gembira
 Heran Sedih Prihatin
Takut Senang
 Marah Acuh Terlenna
 Takjub Emosi Apatis
 Tak Peduli

“JANGAN TERLENA”

- Kesejahteraan dan Perlindungan Pekerja Telah Diatur Dengan Sangat Baik dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- PKB Mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak

“JANGAN LUPA”

	2010 (%)	2025 (%)
Minyak Bumi	44,91	19,65
Batubara	17,15	33,81
Gas Bumi	29,66	25,58
CBM	-	3,93
Tenaga Air	3,40	2,02
Panas Bumi	1,93	5,15
Nuklir	-	1,72
EBT Lainnya	0,29	0,54
Biofuel	2,65	5,13
BBB Cair	-	2,48
Total	100,00	100,00

Bisnis MIGAS adalah industri strategis, investasi yang besar, teknologi yang tinggi, risiko kerja yang besar, menguasai hajat hidup rakyat banyak, dan sebagai sumber keuangan negara untuk pembangunan bangsa

“JANGAN TAKUT”

UU Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja

UU Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 43 (1)

Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, **dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Konsisten Terhadap 3 Komitmen SP

**Mempertahankan Kelangsungan Bisnis Perusahaan | Memberikan
Perlindungan Bagi Pekerja | Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan
Keluarganya**



Waspada !

**Setiap Rencana Konspirasi Selalu
Didahului Adanya Keributan**

Petromindo.Com
INDONESIAN OIL, MINING AND ENERGY NEWS

News Archive Products Job Gallery Tender Event Advertise

Pertamina not yet hand over 159 KKN cases to Attorney General's Office

Pertamina as not serious in handling rampant KKN practices
Sunday, July 16 2000 - 07:00PM WIB
Attorney General Marzuki Darusman said that state oil firm Pertamina had not yet formally handed over ... [Log in to read the story](#)

Login

DREAM DAY Dreaming is Planning. Let's make it happen!

TRENDING NEWS CEK FAKTA EKONOMI PERBANKAN DUNIA HISTORI STORIES KHAS

Petral, sarang mafia migas dilindungi SBY disikat Jokowi

Senin, 18 Mei 2015 07:26
Reporter : [Angga Yudha Pratomo](#)



CNBC INDONESIA

HOME MARKET INVESTMENT **NEWS** ENTREPRENEUR SYARIAH

Harga Minyak Dunia Turun, Kenapa Harga BBM Belum Turun?

NEWS - Anisatul Umah, CNBC Indonesia | 23 April 2020 17:52

Jakarta, **CNBC Indonesia** - Banyak pihak yang meminta agar anjloknya **harga minyak dunia** disikapi dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

jnn.com NASIONAL POLITIK DAERAH ENTERTAINMENT TEKNOLOGI

JPNN.com > Nasional > Tegaskan UU Migas Hasil Konspirasi Asing

Tegaskan UU Migas Hasil Konspirasi Asing

Selasa, 11 September 2012 - 23:03 WIB

Tegaskan UU Migas Hasil Konspirasi Asing

Kontan.co.id

INSIGHT INVESTASI KEUANGAN INDUSTRI NASIONAL INTERNASIONAL PERSONAL FINANCE

INDUSTRI /

BPH Migas mengaku ingin jadi agregator harga gas

Rabu, 22 Juli 2015 / 17:06 WIB

Reporter: [Pratama Guitarra](#) | Editor: [Uji Agung Santosa](#)

JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku siap menjadi agregator gas selain PT Pertamina (Persero) dan PT

EKONOMI

HOME EKONOMI APBN PAJAK INDUSTRI INFRASTRUKTUR **ENERGI** TRADE

Pertamina Bentuk 6 Subholding, Apa Saja Tugasnya?

PT Pertamina (Persero) telah merampungkan restrukturisasinya dengan membentuk enam subholding yang akan mengurus bisnis perseroan dari hulu hingga hilir. Lalu apa saja tugas dari keenam subholding tersebut?

[Lili Sunardi](#) - Bisnis.com
10 September 2021 | 20:44 WIB





**Luruskan Niat !
Apa Yang Kau Cari –
Hai Pejuang SP ?**





Mike Tyson Is Still Really Torn Up
go.com



Mike Tyson vs: Muhammad Ali Who W...
they.com



Mike Tyson Gets Emotional While
vice.com



Mike Tyson Versus Muhammad Ali
vice.com

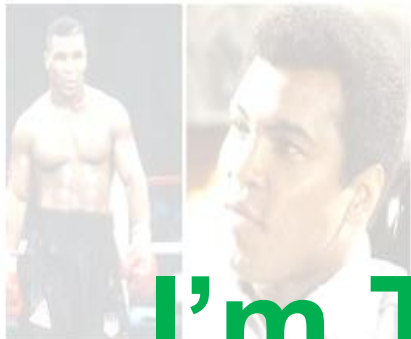


Mike Tyson Is Still Really Torn Up
go.com

I Kill You !!!



Ali vs Tyson - Masters of Opposite
youtube.com



Mike Tyson promised to Muhammad Ali
express.co.uk



Mike Tyson (with surprise guests)
lineupdefeated.com



Mike Tyson First Met Muhammad Ali in Juve
seadspir.com



How Mike Tyson avenged Muhammad Ali
youtube.com

vs I'm The Greatest !!!





Chief Audit Executive
PT Pertamina (Persero)



Project Leader Tim
Pembenahan Tata Kelola
Arus Minyak (PTKAM)
Korporat (2014-2018)



Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Migas
Indonesia (KSPMI)

Dewan Penasihat Federasi
Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) (2014-2018)

Wakil Ketua Forum Ekselen
BUMN (FEB) (2015-2018)

Bapak Faisal Yusra
Ir, SH, MM, QIA, CGra

SVP Supply Distribution & Infrastruktur
Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

Prestasi:
Pekerja Berprestasi atas
Project Leader TIM PTKAM
Penemu Sistem Integrasi 4

Terima Kasih

